

**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah  
(Studi Kasus Pada Kantor Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur)**

**Hendra Hafid Permadi**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

[hendriky36@gmail.com](mailto:hendriky36@gmail.com)

**Hendri Hafid Permadi**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

[hendrisaja3012@gmail.com](mailto:hendrisaja3012@gmail.com)

**Reza Rahmawati**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

[rezarahma12.rr@gmail.com](mailto:rezarahma12.rr@gmail.com)

**Carmidah**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

[carmidah@metrouniv.ac.id](mailto:carmidah@metrouniv.ac.id)

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 15A, Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung

Korespodensi email : [Hendriky36@Gmail.com](mailto:Hendriky36@Gmail.com)

**Abstract.** Regional government financial reports must present information that is relevant, reliable, comparable and easy to understand. This research aims to analyze the influence of the implementation of local government financial accounting systems and internal control activities on the quality of financial reports, both simultaneously and partially. This research is associative in nature. The sample used was 15 people in Sukoharjo Village, Sekampung District, East Lampung Regency, Garut using a saturated sampling method. The analysis used is path analysis because there is a relationship between independent variables. The research results show that the implementation of a regional financial accounting system has a positive but not significant influence on the quality of financial reports, while internal control has a negative influence which is also not significant on the quality of financial reports.

**Keywords:** Quality of financial reports, regional financial accounting system, and internal control

**Abstrak.** Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan aktivitas pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini bersifat asosiatif, Sampel yang digunakan adalah 15 orang di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Garut dengan metode sampling jenuh. Analisis yang digunakan adalah analisis path karena adanya hubungan antar variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pengendalian internal memiliki pengaruh negatif yang juga tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

**Kata kunci:** Kualitas laporan keuangan, Sistem akuntansi keuangan daerah, dan Pengendalian internal

## **LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, laporan keuangan daerah harus konsisten dengan standar yang mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang bisa dinilai dengan uang. Laporan ini harus mencakup semua bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Laporan keuangan adalah faktor penting bagi pemerintah untuk menyajikan dan mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (Aditya & Surjono, 2017). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menetapkan standar normatif untuk informasi akuntansi guna mencapai tujuan tertentu. Karakteristik ini menjadi syarat normatif yang harus dipenuhi agar laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan.

Menurut kerangka konseptual SAP, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan ini digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan, serta membantu dalam pengambilan keputusan. Setiap tahun, laporan keuangan pemerintah diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat atau opini mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian ini didasarkan pada beberapa kriteria: (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian internal (SPI).

Informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah memerlukan sistem akuntansi yang memadai. Menurut Mardiasmo (2009:26), otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk memberikan informasi keuangan yang transparan kepada publik, DPRD, dan stakeholder lainnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan yang sesuai serta memperbaiki mekanisme audit instansi pemerintah daerah. Tantangan dalam mengembangkan sistem akuntansi ini terletak pada kompleksitas lingkungan sektor publik yang membutuhkan keahlian khusus untuk mendesain sistem akuntansi yang tepat.

Kualitas laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai pihak stewards. Di sisi lain, pihak prinsipal, seperti legislatif atau masyarakat umum, memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk mengambil keputusan demi kepentingan terbaik bagi mereka (Syarifudin, 2014). Laporan keuangan sering dikaitkan dengan teori stewardship. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa laporan keuangan adalah asersi dari manajemen pemerintah yang menginformasikan kondisi keuangan kepada para pemangku kepentingan (Yuliani dkk., 2010).

Kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam beberapa tahun terakhir cukup memprihatinkan. Berdasarkan situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, laporan keuangan pemerintah daerah ini belum berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dari tahun 2019 hingga 2022, kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur hanya memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bahkan, pada tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) karena kualitas laporan yang sangat buruk. Pada tahun 2021, laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya, yang dicapai melalui kerja keras dan upaya maksimal. Namun, predikat WTP ini bisa turun jika kinerja tidak dijaga dan dipertahankan.

Laporan keuangan pemerintah daerah akan berkualitas jika proses penyusunan anggaran dilakukan dengan baik. Perencanaan anggaran yang baik memastikan pemerintah memiliki hak untuk memungut pendapatan yang sah dan mengalokasikan belanja sesuai klasifikasi yang tepat. Setiap satuan kerja memiliki Rencana Kerja Anggaran (RKA), yaitu dokumen berisi program kerja dan kegiatan selama satu tahun anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Penyusunan RKA dilakukan dengan klasifikasi anggaran yang tepat agar pengendalian, pengukuran, dan pelaporan kinerja anggaran berjalan dengan baik. Hasil akhir dari penyusunan RKA adalah laporan keuangan, yang merupakan bagian penting dari laporan pertanggungjawaban. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai melalui perencanaan anggaran yang baik, yang dilakukan dari awal periode (Januari) hingga akhir periode (Desember). Perencanaan anggaran yang baik berdampak positif pada perencanaan anggaran berikutnya, sedangkan perencanaan awal yang

buruk dapat berdampak negatif pada perencanaan anggaran berikutnya (Hikmah dan Busaini, 2015).

## **KAJIAN TEORITIS**

Halim (2013) menyatakan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu provinsi, kabupaten, dan kota yang digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur yang dimulai dari proses mengumpulkan data, mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi atau peristiwa keuangan, serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD. APBD ini dapat dibuat secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dengan menggunakan sistem akuntansi, risiko kesalahan dalam pencatatan atau penghitungan dapat diminimalkan, sehingga pemerintah daerah dapat mengurangi risiko yang lebih berat.

### **Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan daerah memiliki tujuan untuk menyajikan informasi mengenai laporan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas. Sehingga Akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk menyuguhkan informasi perihal laporan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan performa kinerja keuangan suatu entitas pelapor yang berguna bagi pengguna dalam mengambil dan menilai keputusan perihal alokasi sumber daya. Secara spesifik, pelaporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyuguhkan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk memperlihatkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

### **Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Berdasarkan interpretasi umum dari standar akuntansi pemerintahan dan regulasi terkait, termasuk Permendagri No. 13 tahun 2006. Secara spesifik, Permendagri tersebut mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan mencakup prosedur yang harus diikuti dalam sistem akuntansi keuangan daerah yang melibatkan beberapa tahap yang mencakup pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan.

## **Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu organisasi, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan terkait pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, serta efisiensi dan efektivitas operasional. Tujuan pengendalian internal adalah untuk mengurangi kesalahan dan penyimpangan yang disebabkan oleh faktor manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pengendalian internal mencakup penelaahan atas catatan dan penilaian atas berbagai fungsi operasional dalam perusahaan, membantu manajemen dalam mengendalikan organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pasal 1 (10), mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai proses yang dipengaruhi oleh manajemen, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat lima komponen pengendalian internal yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
2. Penilaian Resiko (Risk Assessment)
3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)
5. Pemantauan (Monitoring)

Dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu indikator kinerja baik dalam organisasi pemerintahan. Semakin baik sistem akuntansi keuangan yang diterapkan, semakin baik pula kinerja organisasi pemerintahan tersebut. Kinerja yang baik juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi, yang diperlukan untuk mengolah data yang dikumpulkan dan menghasilkan laporan. Agar laporan yang dihasilkan akurat dan berkualitas,

diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem pengendalian internal berfungsi untuk mengawasi kinerja pegawai agar pelaporan keuangan berjalan sesuai harapan.

### **Pengertian Laporan Keuangan Daerah**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Menurut International Federation of Accountants-Public Sector Committee (IFAC-PSC), pengguna laporan keuangan pemerintahan meliputi berbagai kelompok, seperti masyarakat, legislatif dan pengawas, pemerintah dan manajemen, pemberi pinjaman dan kreditor, investor dan analis keuangan, lembaga internasional dan donor, pegawai pemerintah, serta akademisi dan peneliti. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan membantu mereka dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, pemantauan penggunaan dana, serta analisis dan penelitian terkait keuangan publik.

### **Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Daerah**

Secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pengeluaran sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.

5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

### **Komponen Laporan Keuangan SKPD**

Penyusunan laporan keuangan SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran: Menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Unsur yang dicakup meliputi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.
2. Neraca: Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
3. Laporan Operasional: Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Unsur yang dicakup meliputi pendapatan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
4. Laporan Perubahan Ekuitas: Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan: Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan fenomena sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Femenologi dimana pendekatan ini digunakan untuk memahami pengalaman seseorang melalui perspektif subjektif sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ada disekitar masyarakat.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa hasil wawancara dengan beberapa informan/narasumber di Kantor Desa Sukoharjo, Sekampung berupa gambaran umum tentang struktur organisasi. Sumber data yang digunakan berupa:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada narasumber utama yaitu Kepala Desa Sukoharjo, Kepala bidang Perbendaharaan, dan Kepala Bidang Pengembangan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen keuangan dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, studi literatur serta sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dengan adanya teknik pengumpulan data, akan memudahkan dalam mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melalui wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian ini dirancang untuk mendapatkan data dan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah, aktivitas dan kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang telah ditentukan dan melakukan Observasi untuk mengamati proses pengelolaan keuangan, penerapan sistem akuntansi, dan aktivitas pengendalian internal dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih dalam dan kontekstual.

### **Teknik Analisis Data**

Langkah analisis data yang dikembangkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data dari wawancara, observasi, dan dokumen dikembangkan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini,
2. Data yang sudah dikumpulkan, ditentukan tema atau topik utama yang berkaitan dengan pembahasan.
3. Menentukan keterkaitan antar tema sehingga dapat ditemukan jawaban dari analisis tematik.

4. Interpretasi tema dengan menggunakan sumber data yang relevan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
5. Hasil interpretasi ditulis secara deskriptif agar lebih mudah dipahami.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur**

Sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset perusahaan, memastikan informasi akuntansi yang akurat, serta mematuhi hukum dan kebijakan manajemen. Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Sistem pengendalian internal penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pengawasan internal dan eksternal.

Pengawasan internal di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dilakukan oleh kasubag keuangan dan pimpinan, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat. Unsur-unsur pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2008 mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

BPKAD Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal, seperti penetapan tanggung jawab, pemisahan tugas, pengendalian fisik, pengecekan independen, dan penggunaan CCTV untuk memantau aktivitas. Prosedur pengendalian internal juga mencakup pemisahan tugas, keamanan aset, dan pengecekan independen untuk mencegah kesalahan dan penyelewengan.

Hasil analisis menunjukkan sistem pengendalian internal yang dilakukan menunjukkan memiliki pengaruh yang negatif yang sehingga tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun pengendalian internal sudah diterapkan, implementasinya mungkin belum efektif atau tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Adapun ketidakpatuhan terhadap prosedur pengendalian internal dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya pengendalian internal dapat menjadi penyebab utama. Sehingga perlu ada evaluasi mendalam terhadap prosedur pengendalian internal yang ada dan perlu adanya peningkatan kesadaran serta komitmen pada aparatur desa.

## ***ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH***

Kesimpulannya, sistem pengendalian internal yang diterapkan di BPKAD Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan meminimalisir kesalahan. Pemantauan terhadap laporan keuangan dilakukan baik secara internal oleh tenaga akuntan dan pimpinan, maupun secara eksternal oleh Inspektorat.

### **Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Sampel yang digunakan adalah orang-orang aparatur desa dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas aparatur desa yang penulis wawancarai berpendapat bahwa mereka dapat memahami dasar-dasar sistem akuntansi keuangan daerah, namun terdapat kekurangan dalam implementasinya yaitu dalam teknis dan penggunaan teknologi pendukungnya. Kebanyakan dari mereka sebenarnya menyadari akan pentingnya pengendalian internal dalam laporan keuangan desa, tetapi praktik sehari-hari menunjukkan bahwa adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ada. Dari Kualitas Laporan Keuangannya menurut aparatur bagian keuangan menilai bahwa menurutnya laporan keuangan mereka sudah cukup relevan dan dapat dipahami, tetapi masih ada kekurangan dalam hal keandalan dan kemudahan perbandingan.

Kesimpulannya, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan menunjukkan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pemahaman teknis yang memadai di antara aparatur desa. Ketidacukupan fasilitas teknologi dan sumber daya juga menjadi faktor penghambat utama. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, maka perlu adanya peningkatan dalam pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur melibatkan pengawasan dan pencatatan

yang ketat. Laporan keuangan yang dihasilkan mencakup laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan memadai untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, menunjukkan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pemahaman teknis di antara aparatur desa, serta ketidakcukupan fasilitas teknologi dan sumber daya. Meskipun aparatur desa memahami pentingnya pengendalian internal, masih terdapat ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ada. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, diperlukan peningkatan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Angraini, D. Y. (2016). "Pengaruh penerapan sistem keuangan daerah, transparansi, aktivitas pengendalian dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah" (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir). *JOM Fekon*, 3(1), Februari. Dibimbing oleh Restu Agusti dan Lila Angraini. Riau University, Pekanbaru.
- Dewi, N. P. R. F., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2022). "Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung." *Jurnal Kharisma*, 4(1).  
*menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas pada PT Bank Sumut tahun 2016-2020.* *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 9(1), 13-19.
- Novita, N. D., & Sanga, K. P. (2023). "Pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa pada tingkat Kecamatan Palue." *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1(5), September. Universitas Nusa Nipa Maumere.
- Rahayu, S., & Kanita, A. D. (2023). "Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah" (Studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2022). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*.
- Rahmany, S., & Fatimah. (2020). "Analisis sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam perspektif Islam" (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 110-123.

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN  
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH**

Simorangkir, Butarbutar, & Melianna. (2023). "*Analisis kinerja keuangan dengan*

Yisna. "*Analisis penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada Kantor Camat Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.*" e-ISSN: 2722-984X.